



# Rencana Kerja 2022

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

Jl. Sunan Ampel No. 1 Telp. (0231) 321431

S U M B E R



## KATA PENGANTAR

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja perubahan yang ditetapkan. Pada tahun 2022 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Perubahan pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Sumber, Pebruari 2021

**KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**Drs. ERUS RUSMANA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690716 199006 1 001





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020 .....</b>	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon. ....	10
2.3. Isu Strategis dan Permasalahan Yang dihadapi .....	11
2.4. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat .....	13
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>14</b>
3.1. Tujuan.....	14
3.2. Sasaran .....	14
3.3. Program .....	14
3.4. Kegiatan .....	15
3.5. Sub Kegiatan.....	15
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>19</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN .....</b>	<b>20</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu, perencanaan yang terkonsep dan tersusun dengan baik tentunya sangat berpengaruh demi mencapai hasil yang optimal di masa mendatang.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan mengacu pada RKPД Kabupaten Cirebon.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah dan lembaga otonomi di daerah mempunyai peran yang sangat strategis, sebagai ujung tombak untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpunan dana baik untuk pelaksanaan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan di daerah.

Agar sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dapat digali secara optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan perencanaan yang baik.

Oleh karena itu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan



daerah, perlu menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai suatu proses penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahun 2019-2024.

Pemerintahan Kabupaten Cirebon mempunyai perhatian yang sangat besar dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini tertuang dalam kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penggalan sumber-sumber pendapatan dan keuangan daerah, untuk melaksanakan otonomi daerah mencapai visi Kabupaten Cirebon yaitu : ***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman “***

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
19. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);



20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
22. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D 7);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D 11);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 89, Seri D 38);





28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 adalah sebagai panduan untuk pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan pelaksana program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2022.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS).

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang gambaran umum tentang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

### 1.2 Landasan Hukum

Menguraikan secara ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Mengemukakan sistematika rencana kerja terkait dengan pengaturan serta penjelasan isi dari setiap BAB.

## **BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan**

**Daerah Kab. Cirebon Tahun 2020 dan Capaian Renstra  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon.**

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan**

**Daerah Kab. Cirebon.**

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan**

**Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab Cirebon.**

### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

## **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Tujuan**

### **3.2 Sasaran**

### **3.3 Program**

### **3.4 Kegiatan**

### **3.5 Sub Kegiatan**

## **BAB VII : PENUTUP**



## BAB II

# EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD

Pada tahun 2020 target penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000,- realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 223.610.292.769,- atau sebesar 111,81%.

Kode Rekening	Uraian	Target 2020 (Rp.)	Realisasi 2020 (Rp.)	%	Target 2021
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>223.610.292.769</b>	<b>111,81</b>	<b>259.945.345.000</b>
1.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>223.610.292.769</b>	<b>111,81</b>	<b>259.945.345.000</b>
1.1.1.	<b>Hasil Pajak Daerah</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>223.610.292.769</b>	<b>111,81</b>	<b>259.945.345.000</b>
1.1.1.01.	Pajak Hotel	4.236.505.823	5.178.805.227	122,24	8.096.896.000
1.1.1.02.	Pajak Restoran	12.398.705.270	14.750.301.576	118,97	20.243.762.000
1.1.1.03.	Pajak Hiburan	593.379.033	769.049.251	129,61	2.186.939.000
1.1.1.04.	Pajak Reklame	4.600.000.000	4.961.149.418	107,85	5.010.591.000
1.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	69.299.710.672	71.963.426.458	103,84	86.307.500.000
1.1.1.06.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.200.000.000	13.920.408.315	114,10	13.262.175.000
1.1.1.07.	Pajak Parkir	538.327.428	538.536.901	100,04	698.573.000
1.1.1.08.	Pajak Air Tanah	1.081.630.000	1.211.111.818	111,97	1.203.600.000
1.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000	61.016.000	101,69	60.000.000
1.1.1.10.	Pajak Bumi dan Bangunan	43.691.741.774	48.247.842.583	110,43	49.875.309.000
1.1.1.11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	51.300.000.000	62.008.645.222	120,87	73.000.000.000
<b>Jumlah Pajak Daerah</b>		<b>200.000.000.000</b>	<b>223.610.292.769</b>	<b>111,81</b>	<b>259.945.345.000</b>

Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 terdiri dari:

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung	16.772.226.000	16.186.146.669	586.079.331	96,51
Belanja Langsung	4.407.796.050	4.070.180.215	337.615.835	92,34
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>21.180.022.050</b>	<b>20.256.326.884</b>	<b>923.695.166</b>	<b>95,64</b>



Anggaran belanja digunakan untuk membiayai kegiatan struktural dan fungsional Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Daftar anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2020 dapat dilihat tabel berikut ini:

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	SISA (Rp.)
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(3-4)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>16.772.226.000</b>	<b>16.186.146.669</b>	<b>96,51%</b>	<b>586.079.331</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>16.772.226.000</b>	<b>16.186.146.669</b>	<b>96,51%</b>	<b>586.079.331</b>
<b>1.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>4.848.060.000</b>	<b>4.480.862.788</b>	<b>92,43%</b>	<b>367.197.212</b>
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.600.644.000	3.354.783.500	93,17%	245.860.500
	Tunjangan Keluarga	391.382.000	363.485.968	92,87%	27.896.032
	Tunjangan Jabatan	183.039.000	182.865.000	99,90%	174.000
	Tunjangan Fungsional	35.547.000	24.925.000	70,12%	10.622.000
	Tunjangan Umum	139.709.000	131.265.000	93,96%	8.444.000
	Tunjangan Beras	238.652.000	192.419.940	80,63%	46.232.060
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.642.000	2.653.208	72,85%	988.792
	Pembulatan Gaji	55.000	45.493	82,71%	9.507
	Iuran Asuransi Kesehatan	211.527.000	200.943.293	95,00%	10.583.707
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	10.966.000	6.869.101	62,64%	4.096.899
	Jaminan Kematian (JKM)	32.897.000	20.607.285	62,64%	12.289.715
<b>2.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.924.166.000</b>	<b>1.712.160.000</b>	<b>88,98%</b>	<b>212.006.000</b>
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.924.166.000	1.712.160.000	88,98%	212.006.000
<b>3.</b>	<b>Biaya Pemungutan Pajak Daerah</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>9.993.123.881</b>	<b>99,93%</b>	<b>6.876.119</b>
	Belanja Pajak Daerah	10.000.000.000	9.993.123.881	99,93%	6.876.119



## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Error! Not a valid link.

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	SISA (Rp.)
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(3-4)
11	Peningkatan Motivasi Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Reklame	97.206.700	97.206.700	100,00%	-
12	Peningkatan Pelayanan Pajak BPHTB	90.444.400	87.108.240	96,31%	3.336.160
13	Peningkatan Kompetensi Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-
14	Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame	113.850.000	102.417.160	89,96%	11.432.840
15	Pendistribusian SPTPD, SKPD dan Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame	135.042.000	134.592.000	99,67%	450.000
16	Peningkatan Pelayanan Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Reklame	80.445.000	80.445.000	100,00%	-
17	Penilaian Wajib Pajak Daerah dan Penyerahan Reward Kepada Wajib Pajak Teladan	-	-	-	-
18	Operasi Terpadu Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	128.007.200	123.601.920	96,56%	4.405.280
19	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	1.146.002.700	1.110.327.100	96,89%	35.675.600
20	Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	471.059.950	450.706.950	95,68%	20.353.000
<b>6.</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	1.080.000	100,00%	-

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon.

Pencapaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

Tahun 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menetapkan target peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 11,23 %.

Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan berdasarkan indikator sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2020.

**Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon**  
**Tahun 2020**

NO	IKK	TARGET	RUMUS / FORMULASI	JENIS DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	11,23%	Kenaikan / Penurunan Pajak Daerah dibagi Pajak Daerah tahun lalu dikali 100 %  $\frac{223.610.292.769 - 213.572.238.616}{213.572.238.616} \times 100 = 4,70$	- Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020, sebesar Rp. 223.610.292.769,-  - Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019, sebesar Rp. 213.572.238.616
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,28 Poin	Dilakukan survei IKM melalui kuesioner yang disebar berjumlah 1740 kuesioner kepada wajib pajak daerah diperoleh nilai 82,30 Poin dengan Predikat B (Baik)	Laporan IKM Tahun 2020

**Capaian Realisasi Indikator Kinerja**  
**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%)	KATEGORI/ KET
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	11,23	4,7	41,85	Tidak Tercapai
2	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82,28	82,30	100,02	Tercapai

### 2.3. Isu Strategis dan Permasalahan Yang dihadapi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029, Kabupaten Cirebon ditetapkan ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Ciayumajakuning diarahkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, bisnis kelautan dan pertanian dan kegiatan pertambangan mineral.



Rumusan arah dan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Cirebon bidang pajak daerah untuk lima tahun ke depan, yaitu meningkatkan penerimaan pajak daerah tiap tahun rata-rata 14,66% serta meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan indeks kepuasan masyarakat 83%.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 yaitu:

- a. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan berinvestasi berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
- b. Adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap penurunan sektor ekonomi secara global.

Dalam era otonom daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensi harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

#### 1. Permasalahan Internal



- a. sumber daya manusia yang terbatas;
  - b. kurangnya sarana prasarana pelayanan pajak,
  - c. sistem informasi dan teknologi yang masih terbatas,
2. Permasalahan eksternal
- a. Kebijakan Pajak Daerah yang masih perlu untuk disempurnakan,
  - b. Sinergi dengan stake holder yang masih perlu dioptimalkan,
  - c. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.
  - d. Pandemi covid-19 yang masih terjadi di Indonesia

#### **2.4. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat**

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan.



## BAB III

# TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah dan;
2. Meningkatnya kinerja dinas dalam pelayanan masyarakat wajib pajak.

### 3.2. Sasaran

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan indikator :
  - ✓ Meningkatnya penerimaan pajak daerah tiap tahun sebesar 14,66 %.
2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan indikator :
  - ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,64 Poin.

### 3.3. Program

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, maka ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ada 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

### 3.4. Kegiatan

Dari program-program tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah , sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Kegiatan :

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Kegiatan :

- 2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

### 3.5. Sub Kegiatan

Dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam Subkegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.1.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 1.1.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 1.1.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - 1.1.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - 1.1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 1.1.6. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - 1.1.7. Penyediaan Bahan/Material;
  - 1.1.8. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - 1.1.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - 1.1.10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
  - 1.1.11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.1.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.



- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 1.1.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.1.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - 1.1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 1.1.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - 1.1.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  - 1.1.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - 1.1.1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
  - 1.1.2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
  - 1.1.3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
  - 1.1.4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
  - 1.1.5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
  - 1.1.6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
  - 1.1.7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);



- 1.1.8. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- 1.1.9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- 1.1.10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- 1.1.11. Penagihan Pajak Daerah;
- 1.1.12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

RENCANA KERJA 2022



## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja ini merupakan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Cirebon ***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”***.

Agar rencana kerja ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Sumber, Pebruari 2021

**KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**Drs. ERUS RUSMANA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690716 199006 1 001





## RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

### SKPD: 5-2.0-0.0-0.02. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>0.</b>	<b>NON URUSAN</b>				22.222.224.170				30.474.118.000
<b>0.00.</b>	<b>NON BIDANG URUSAN</b>				22.222.224.170				30.474.118.000
<b>0.00.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah		82,64 Poin	22.222.224.170			82,82 Poin	30.474.118.000
<b>0.00.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dok	63.398.500	PIS		2 Dok	91.011.000
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)		2 Dok	22.591.100	PIS		2 Dok	32.211.000
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dok	6.773.500	PIS		1 Dok	8.500.000
0.00.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dok	6.482.100	PIS		1 Dok	8.300.000
0.00.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD		1 Dok	6.972.800	PIS		1 Dok	8.500.000
0.00.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok	5.950.300	PIS		1 Dok	8.500.000
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen LAKIP, LPPD dan Laporan Rutin Bulanan Kinerja SKPD		3 Dok	8.355.900	PIS		3 Dok	10.000.000
0.00.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dok	6.272.800	PIS		1 Dok	15.000.000
<b>0.00.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Gaji Pegawai		100 Prosen	19.610.466.550	PIS		100 Prosen	25.251.411.000
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan		70 pegawai	19.588.517.250	PIS		73 pegawai	25.225.730.000
0.00.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD		1 Dok	3.943.200	PIS		1 Dok	4.800.000
0.00.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dok	4.442.600	PIS		1 Dok	5.400.000
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Tahunan		1 Dok	7.252.800	PIS		1 Dok	8.500.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		1 Dok	6.310.700	PIS		1 Dok	6.981.000
<b>0.00.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah SKPD		1 Dok	-	PIS		1 Dok	61.000.000
0.00.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dok	-			1 Dok	11.000.000
0.00.01.2.03.03.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		100 Dok	-			100 Dok	10.000.000
0.00.01.2.03.04.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		100 Dok	-			100 Dok	10.000.000
0.00.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 dok	-			1 dok	10.000.000
0.00.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Dok	-			1 Dok	10.000.000
0.00.01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		100 Dok	-			100 Dok	10.000.000
<b>0.00.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		5 unit	-	PIS		5 unit	150.000.000
0.00.01.2.05.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		4 unit	-			4 unit	60.000.000
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab.Cirebon Beserta Kelengkapannya		122 Buah	-			122 Buah	90.000.000
<b>0.00.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpeliharanya Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah		6 aplikasi	1.001.459.370	PIS		6 aplikasi	1.562.377.000
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi/Penerangan kantor		100 Prosen	7.834.530	PIS		100 Prosen	25.000.000
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20 jenis	658.693.700	PIS		20 jenis	700.000.000
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor		100 Prosen	28.936.600	PIS		100 Prosen	60.000.000
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kebutuhan Kantor		100 Prosen	35.200.000	PIS		100 Prosen	180.000.000
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		100 Prosen	43.457.480	PIS		100 Prosen	125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Media Cetak lokal dan regional		3 Jenis	52.100.000	PIS		3 Jenis	72.000.000
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor Sesuai Kebutuhan		60 jenis	99.159.610	PIS		60 jenis	119.627.000
0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu		100 Prosen	-			100 Prosen	40.000.000
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		12 bulan	59.677.000	PIS		12 bulan	120.000.000
0.00.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Yang Handal		12 bulan	16.400.450	PIS		12 bulan	30.000.000
0.00.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpeliharanya Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah		6 aplikasi	-			6 aplikasi	90.750.000
<b>0.00.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD		100 Prosen	183.096.100	PIS		100 Prosen	1.680.000.000
0.00.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kendaraan dinas jabatan		3 Unit	-			0 Unit	750.000.000
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		9 Unit	127.553.800	PIS		8 Unit	250.000.000
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Tersedianya Perlengkapan Meubeler Kantor		8 jenis	55.542.300	PIS		8 jenis	80.000.000
0.00.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		100 Prosen	-			100 Prosen	100.000.000
0.00.01.2.07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud		1 aplikasi	-			1 aplikasi	100.000.000
0.00.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 unit	-			1 unit	400.000.000
<b>0.00.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang kebutuhan kantor		100 Prosen	257.243.450	PIS		100 Prosen	416.470.000
0.00.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		100 Prosen	-			100 Prosen	30.000.000
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis tagihan rekening		3 Jenis	249.752.000	PIS		3 Jenis	338.316.000
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana pemeliharaan kantor		8 Jenis	7.491.450	PIS		8 Jenis	18.154.000
0.00.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		100 Prosen	-			100 Prosen	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>0.00.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sesuai standar pelayanan Prima		100 Prosen	1.106.560.200	PIS		100 Prosen	1.261.849.000
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan dinas atau jabatan		53 unit	245.031.700	PIS		58 unit	255.000.000
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Surat Kendaraan Dinas Operasional Menjadi Sah		62 Unit	20.875.500	PIS		62 Unit	22.122.000
0.00.01.2.09.08.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya Aset Tak Berwujud		1 unit	30.000.000	PIS		1 unit	30.000.000
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung/Kantor		19 Jenis	698.867.000	PIS		19 Jenis	804.727.000
0.00.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung / Kantor dan Genset		6 Jenis	111.786.000	PIS		6 Jenis	150.000.000
<b>5.</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				5.126.836.680				10.537.437.530
<b>5.02.</b>	<b>KEUANGAN</b>				5.126.836.680				10.537.437.530
<b>5.02.04.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Meningkatkan penerimaan pajak daerah		14,66 Prosen	5.126.836.680			14,66 Prosen	10.537.437.530
<b>5.02.04.2.01.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah		100 Prosen	5.126.836.680	PIS		100 Prosen	10.537.437.530
5.02.04.2.01.01.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen Perencanaan Target Penerimaan Pajak Daerah		1 Dok	262.216.500	PIS		1 Dok	540.800.000
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya Perbup/SK Bupati tentang pajak daerah		11 Dok	173.457.970	PIS		11 Dok	220.000.000
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Tentang Pajak Daerah	-	11 wajib pajak	355.006.120	PIS		11 wajib pajak	901.150.000
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	tersedianya sarana dan prasarana penunjang sistem informasi pajak daerah	-	3 aplikasi	332.659.940	PIS		4 aplikasi	668.300.000
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Data wajib pajak dan objek pajak	-	11 pajak daerah	451.233.940	PIS		11 pajak daerah	490.406.998
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tersedianya Basis Data Pajak Daerah yang mutakhir	-	11 pajak daerah	-			11 pajak daerah	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersedianya data PBB dan BPHTB yang akurat	-	2 pajak daerah	853.412.990	PIS		2 pajak daerah	1.794.124.908
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Penilaian dan penetapan Pajak Daerah Lainnya	-	9 pajak daerah	148.897.760	PIS		9 pajak daerah	217.604.218
5.02.04.2.01.09.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	11 pajak daerah	-			11 pajak daerah	180.000.000
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Verifikasi Data Pelaporan pajak daerah	-	11 pajak daerah	1.184.090.100	PIS		11 pajak daerah	2.744.761.406
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	-	11 pajak daerah	145.544.540	PIS		11 pajak daerah	260.000.000
5.02.04.2.01.12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselsaikannya Permasalahan Wajib Pajak Daerah	-	11 pajak daerah	120.027.470	PIS		11 pajak daerah	250.000.000
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang patuh	-	150 pajak daerah	1.010.708.260	PIS		180 pajak daerah	1.778.290.000
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	-	12 laporan	89.581.090	PIS		12 laporan	192.000.000
<b>J U M L A H</b>					<b>27.349.060.850</b>				<b>41.011.555.530</b>

Sumber, 03 Pebruari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690716 199006 1 001